

Pendidikan Multikultural sebagai Strategi Memperkuat Persatuan dalam Masyarakat Majemuk

Meisi Age ¹

Pendidikan Agama Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
meisiage@gmail.com

Melna Gobel ²

Pendidikan Agama Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
melnagbl@gmail.com

Steviani Koikig ³

Pendidikan Agama Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
stevianikoikig@gmail.com

Syalomita Mangkat ⁴

Pendidikan Agama Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
syalomitamangkat@gmail.com

Befry Guma ⁵

Pendidikan Agama Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
gbefry@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of education in managing diversity and strengthening tolerance and social unity in Indonesia's pluralistic society. The study contributes to a conceptual understanding of the importance of multicultural education, character education, religious education, and civic education as instruments for fostering an inclusive social life. This research employed a literature study using a descriptive approach. Data were obtained through a review of books, journals, scientific articles, and other relevant literature, which were analyzed descriptively and conceptually based on the research themes. The findings indicate that education has a strategic position as a space for bringing together differences through the development of knowledge, attitudes, and social skills, including tolerance, empathy, communication, cooperation, justice, and respect for diversity. However, managing diversity continues to face challenges, including unequal access to and quality of education, the digital divide, differences in students' learning needs, limited teacher competence, and socio-economic and cultural issues. Strengthening social unity requires the reinforcement of Pancasila values, differentiated learning, inclusive curricula, multicultural education, strengthened civic education, and continuous teacher professional development. In conclusion, education should be developed as an ecosystem that transforms diversity into a learning resource and tolerance into a social practice in order to foster an inclusive, harmonious, and united society.

Keywords: Multicultural Education, Tolerance, Diversity, Social Unity, Character Education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan dalam mengelola keberagaman serta memperkuat sikap toleransi dan persatuan sosial dalam masyarakat majemuk Indonesia. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya pendidikan multikultural, pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pembentukan kehidupan sosial yang inklusif. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (literature study) dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penelaahan buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur relevan yang dianalisis secara deskriptif dan konseptual berdasarkan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis sebagai ruang pertemuan berbagai perbedaan melalui pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang meliputi toleransi, empati, komunikasi, kerja sama, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun, pengelolaan keberagaman masih menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan, kesenjangan digital, perbedaan kebutuhan peserta didik, keterbatasan kompetensi guru, serta persoalan sosial-ekonomi dan budaya. Upaya penguatan persatuan perlu dilakukan melalui penguatan nilai Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum inklusif, pendidikan multikultural, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, serta peningkatan profesionalisme guru. Kesimpulannya, pendidikan perlu dikembangkan sebagai ekosistem yang menjadikan keberagaman sebagai sumber pembelajaran dan toleransi sebagai praktik sosial untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan bersatu.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Toleransi, Keberagaman, Persatuan Sosial, Pendidikan Karakter.

ARTICLE HISTORY

Submitted: 08-01-2026 | Accepted: 31-08-2026 | Publication: 31-08-2026

© 2026 The Author(s). Published by PT GKN. THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual
This is an open-access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk dengan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sosial dan budaya yang menjadi karakteristik kehidupan bangsa Indonesia, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi persoalan apabila tidak disertai dengan kemampuan untuk menerima, menghargai, dan mengelola perbedaan secara bijaksana. Dalam kehidupan sosial, perbedaan latar belakang dapat memunculkan sikap eksklusif, prasangka, diskriminasi, dan intoleransi yang berpotensi mengganggu hubungan antarkelompok serta melemahkan persatuan. Oleh karena itu, persoalan utama dalam masyarakat majemuk bukan terletak pada keberadaan perbedaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana perbedaan tersebut dipahami dan dikelola sehingga menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari proses pembentukan cara pandang dan sikap individu terhadap keberagaman. Pemahaman yang terbatas mengenai perbedaan etnis, budaya, agama, dan sistem kepercayaan dapat menyebabkan seseorang memandang kelompok lain secara stereotip dan kurang terbuka terhadap perbedaan. Dalam konteks pendidikan, keberagaman peserta didik menghadirkan kebutuhan akan proses pembelajaran yang mampu membangun pemahaman lintas budaya dan penghargaan terhadap orang lain. Melkisedek dkk. (2025) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis multikultural memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok dari berbagai latar belakang sehingga dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi proses pembentukan sikap sosial peserta didik dalam menghadapi realitas masyarakat yang beragam.

Apabila keberagaman tidak dikelola melalui proses pendidikan yang tepat, berbagai akibat dapat muncul dalam kehidupan sosial. Sikap intoleransi, diskriminasi, konflik antarkelompok, dan melemahnya kohesi sosial dapat berkembang ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan menerima perbedaan. Tilaar (2015) menegaskan bahwa masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran kolektif agar keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan sosial, bukan menjadi sumber konflik yang mengancam persatuan. Dalam lingkungan pendidikan, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena sekolah merupakan ruang sosial tempat peserta didik dari berbagai latar belakang berinteraksi secara intensif. Dengan demikian, kegagalan pendidikan dalam mengembangkan sikap terbuka terhadap keberagaman tidak hanya berdampak pada hubungan antarpeserta didik, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan generasi muda dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan inklusif.

Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah memperkuat pendidikan yang berorientasi pada keberagaman melalui pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, dan integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembelajaran. Pendidikan multikultural dapat

memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenal berbagai latar belakang budaya dan memahami bahwa perbedaan merupakan bagian dari kehidupan bersama. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat memperkuat kesadaran mengenai persatuan, tanggung jawab sebagai warga negara, serta penghargaan terhadap hak dan keberadaan kelompok lain. Pendekatan tersebut perlu didukung oleh kurikulum yang inklusif, pendidik yang mampu mengelola keberagaman, serta lingkungan belajar yang mendorong dialog, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan strategi tersebut, pendidikan dapat diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga untuk membentuk kemampuan sosial yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat majemuk.

Penerapan pendidikan yang berorientasi pada keberagaman memiliki manfaat yang luas bagi peserta didik maupun kehidupan sosial. Melalui proses pembelajaran yang menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan, peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka, empati, dan kemampuan berinteraksi dengan individu yang memiliki latar belakang berbeda. Nasution dan Albina (2024) menjelaskan bahwa penanaman nilai toleransi melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun karakter bangsa yang berlandaskan semangat persatuan dan keberagaman dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana preventif untuk mengurangi potensi konflik sekaligus membangun kohesi sosial. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan dalam lingkungan sekolah, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi peserta didik untuk berpartisipasi secara positif dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Dalam kajian ini, pendidikan multikultural dipahami sebagai pendekatan pendidikan yang memberikan perhatian terhadap keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik serta mendorong penghargaan terhadap perbedaan, kesetaraan, dan kehidupan bersama. Toleransi merujuk pada sikap menerima dan menghargai keberadaan perbedaan serta memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan latar belakang dan keyakinannya. Sementara itu, persatuan sosial dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai kondisi hubungan sosial yang ditandai oleh kemampuan individu dan kelompok untuk hidup bersama, bekerja sama, saling menghormati, serta menjaga kohesi di tengah keberagaman. Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan karena pendidikan multikultural dapat menjadi sarana pembentukan toleransi, sedangkan toleransi menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat persatuan sosial dalam masyarakat majemuk.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pendidikan dan pengelolaan keberagaman. Pertama, Melkisedek dkk. (2025) membahas peran Pendidikan Agama Kristen dalam membangun toleransi di masyarakat majemuk dan menekankan pentingnya pembelajaran yang memberikan ruang interaksi dengan individu dari berbagai latar belakang. Kedua, Acep dan Abdurahman (2026) mengkaji penguatan karakter

toleransi dalam implementasi pendidikan multikultural yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, Dahri dan Wahyuni (2025) menyoroti tantangan dan strategi pendidikan multikultural dalam masyarakat majemuk dan menunjukkan bahwa keberagaman di lingkungan pendidikan membutuhkan pengelolaan yang tepat agar tidak berkembang menjadi konflik dan melemahkan kohesi sosial. Sementara itu, Purnama (2021) menekankan bahwa implementasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran PPKn dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan memperkuat integrasi sosial di tengah pluralitas masyarakat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian Melkisedek dkk. (2025) lebih menekankan peran Pendidikan Agama Kristen dalam membangun toleransi. Acep dan Abdurahman (2026) berfokus pada pendidikan multikultural dan penguatan karakter. Dahri dan Wahyuni (2025) menyoroti tantangan dan strategi pendidikan multikultural, sedangkan Purnama (2021) membahas implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran PPKn. Kajian-kajian tersebut cenderung membahas aspek tertentu secara terpisah. Dengan demikian, masih diperlukan kajian yang mensintesiskan peran pendidikan secara lebih komprehensif sebagai ruang pertemuan berbagai perbedaan, sarana pembentukan toleransi, sekaligus strategi memperkuat persatuan sosial dalam masyarakat majemuk. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting untuk mengembangkan pembahasan yang menghubungkan pendidikan multikultural, toleransi, pengelolaan keberagaman, dan persatuan sosial dalam satu kerangka kajian.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dalam merajut kebersamaan di tengah masyarakat majemuk, khususnya melalui penguatan pendidikan multikultural, penanaman nilai toleransi, serta pengelolaan keberagaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pendidikan dalam mengelola perbedaan serta merumuskan upaya pendidikan yang dapat memperkuat persatuan sosial. Kajian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis dalam memperkaya pembahasan mengenai pendidikan dan masyarakat majemuk, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pendidik, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mengembangkan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun kehidupan bersama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengkaji secara kritis peran pendidikan dalam merajut kebersamaan dan memperkuat persatuan sosial dalam masyarakat majemuk. Objek penelitian berupa literatur yang relevan dengan fokus kajian, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya yang membahas pendidikan multikultural, toleransi, keberagaman, pendidikan

kewarganegaraan, dan persatuan sosial. Data dikumpulkan melalui teknik penelusuran dan dokumentasi literatur dengan mengidentifikasi, memilih, membaca, mencatat, dan mengelompokkan sumber berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Literatur yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi gagasan utama, kategorisasi informasi berdasarkan tema penelitian, interpretasi hubungan antarkonsep, serta sintesis kritis terhadap berbagai temuan dan pandangan dari sumber yang dikaji. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi makna keberagaman, peran pendidikan sebagai ruang pertemuan berbagai perbedaan, kontribusi pendidikan dalam menumbuhkan toleransi, tantangan pengelolaan keberagaman, serta strategi pendidikan dalam memperkuat persatuan sosial dalam masyarakat majemuk.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Multikultural sebagai Ruang Penguatan Toleransi dan Persatuan dalam Masyarakat Majemuk

Keberagaman merupakan karakteristik fundamental masyarakat Indonesia yang tercermin dalam perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, tradisi, dan latar belakang sosial. Kondisi tersebut merupakan kekayaan bangsa yang memiliki potensi besar untuk membangun kehidupan sosial yang dinamis, tetapi juga dapat menjadi sumber persoalan apabila tidak disertai kemampuan untuk memahami dan mengelola perbedaan secara konstruktif. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat melahirkan prasangka, diskriminasi, eksklusivisme, bahkan konflik antarkelompok. Karena itu, keberagaman tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang harus diseragamkan, melainkan sebagai realitas sosial yang membutuhkan sikap saling menghormati, kesetaraan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan. Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai ruang pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang diperlukan individu untuk berinteraksi dalam masyarakat majemuk. Pendidikan dapat mengubah keberagaman dari sekadar fakta sosial menjadi pengalaman pembelajaran yang membangun toleransi, solidaritas, dan kebersamaan.

Pendidikan multikultural menjadi pendekatan yang relevan untuk menjalankan fungsi tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenali, memahami, dan menghargai keberagaman. Atmaja (2020) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural berperan dalam menanamkan nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, kesetaraan, dan demokrasi kepada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya berorientasi pada pengetahuan mengenai berbagai budaya, tetapi juga pada pembentukan kemampuan peserta didik untuk berinteraksi secara positif dengan individu yang memiliki latar belakang berbeda. Pendekatan ini penting karena pemahaman mengenai keberagaman akan memiliki makna apabila diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Peserta didik perlu memperoleh

pengalaman untuk bekerja sama, berdialog, menyelesaikan perbedaan, serta membangun hubungan yang setara dengan orang lain. Dalam perspektif ini, sekolah dapat dipandang sebagai miniatur masyarakat yang memungkinkan peserta didik mengalami secara langsung proses kehidupan dalam keberagaman.

Fungsi pendidikan sebagai ruang pertemuan berbagai perbedaan semakin penting dalam menghadapi perkembangan globalisasi dan perubahan sosial. Interaksi antarkelompok semakin intensif melalui mobilitas manusia, perkembangan teknologi, serta pertukaran informasi yang berlangsung cepat. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal berbagai perspektif dan kebudayaan, tetapi sekaligus menghadirkan risiko berkembangnya stereotip, prasangka, dan intoleransi apabila informasi tidak disertai kemampuan berpikir kritis. Hadijaya et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga mentransmisikan nilai budaya dan membentuk dimensi sosial, emosional, serta budaya peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu merepresentasikan keberagaman secara proporsional melalui pengenalan budaya lokal, nasional, dan global. Kegiatan pembelajaran kolaboratif, diskusi lintas budaya, proyek sosial, dan aktivitas ekstrakurikuler juga dapat digunakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam membangun hubungan dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Dengan cara tersebut, pendidikan tidak hanya mengajarkan keberagaman sebagai konsep, tetapi juga menghadirkan keberagaman sebagai pengalaman sosial yang mendidik.

Penguatan toleransi melalui pendidikan pada akhirnya berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan persatuan sosial. Acep dan Abdurahman (2026) menjelaskan bahwa penanaman nilai toleransi melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun karakter yang berlandaskan semangat persatuan dan keberagaman. Toleransi dalam konteks ini tidak berarti menghilangkan perbedaan atau menyamakan seluruh pandangan, tetapi merupakan kemampuan untuk menerima keberadaan pihak lain, menghormati haknya, dan membangun relasi sosial tanpa diskriminasi. Pendidikan dapat menanamkan nilai tersebut melalui praktik sederhana seperti memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik, membangun kerja kelompok yang inklusif, menyelesaikan konflik melalui dialog, serta memberikan ruang terhadap perbedaan pendapat. Praktik tersebut memiliki implikasi penting karena peserta didik belajar bahwa kebersamaan tidak dibangun melalui keseragaman, tetapi melalui kemampuan untuk bekerja sama di tengah perbedaan. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana preventif sekaligus transformatif dalam membangun kohesi sosial.

Dalam konteks kehidupan keagamaan, penguatan toleransi perlu dilengkapi dengan pemahaman mengenai moderasi beragama. Masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama membutuhkan kemampuan untuk menjalankan keyakinan secara bertanggung jawab sekaligus menghormati keberadaan kelompok yang berbeda. Saragih et al. (2023) menekankan

bahwa dalam perspektif Kristen, keberagaman merupakan kekayaan yang perlu dihargai dan diwujudkan melalui nilai persaudaraan, solidaritas, keadilan, kesetaraan, kebebasan, serta kesempatan bagi setiap individu. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan pemahaman doktrinal, tetapi perlu mendorong peserta didik untuk menerjemahkan nilai iman ke dalam tindakan kasih, kepedulian, pelayanan, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam masyarakat plural, identitas keagamaan yang kuat seharusnya tidak menghasilkan sikap eksklusif, melainkan membentuk pribadi yang mampu membangun dialog dan kerja sama dengan orang lain tanpa kehilangan keyakinannya.

Moderasi beragama juga memiliki implikasi terhadap terciptanya harmoni dan stabilitas sosial. Ponno (2023) menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam masyarakat plural untuk mendukung kehidupan yang harmonis dan menjaga perdamaian. Dalam lingkungan pendidikan, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pembelajaran agama yang inklusif, dialog antarpeserta didik, kegiatan sosial bersama, dan pengembangan kemampuan menyelesaikan perbedaan secara damai. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dan teladan dengan memperlakukan seluruh peserta didik secara adil, menghindari stereotip terhadap kelompok tertentu, serta menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan setiap peserta didik merasa dihargai. Sekolah juga dapat mengembangkan proyek kolaboratif lintas latar belakang, kegiatan pelayanan sosial, dan forum dialog yang membangun pemahaman mengenai keberagaman. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi menjadi kompetensi sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan pendidikan sehari-hari.

Berdasarkan sintesis tersebut, pendidikan multikultural dapat diposisikan sebagai strategi penting untuk memperkuat toleransi dan persatuan dalam masyarakat majemuk karena mampu menghubungkan pengetahuan tentang keberagaman dengan pengalaman hidup bersama. Pendidikan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenali perbedaan, membangun empati, mengembangkan kemampuan dialog, dan mempraktikkan kerja sama secara setara. Implikasi praktis dari pembahasan ini adalah perlunya lembaga pendidikan membangun ekosistem yang konsisten antara kurikulum, pembelajaran, keteladanan pendidik, budaya sekolah, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat. Pendidikan multikultural perlu diintegrasikan dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah, sementara pendidikan agama perlu diarahkan pada pembentukan karakter yang inklusif dan bertanggung jawab dalam kehidupan plural. Dengan pendekatan tersebut, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi menjadi ruang pembentukan pengalaman sosial yang mempersiapkan peserta didik untuk hidup berdampingan secara damai. Pada akhirnya, keberagaman dapat

dikembangkan sebagai modal sosial yang memperkuat kebersamaan, kohesi sosial, dan persatuan bangsa.

2. Peran Pendidikan dalam Menumbuhkan Sikap Tolerans

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam mengembangkan kemampuan untuk hidup bersama di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang memungkinkan peserta didik berinteraksi secara konstruktif dengan orang lain. Pendidikan karakter menjadi salah satu instrumen penting karena melalui proses pembelajaran peserta didik dapat mengembangkan empati, tanggung jawab, kemampuan mengambil keputusan, serta penghargaan terhadap keberadaan orang lain. Nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting pada jenjang pendidikan dasar karena masa tersebut merupakan tahap pembentukan karakter dan kebiasaan sosial yang dapat memengaruhi perilaku peserta didik pada tahap perkembangan berikutnya. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kemampuan peserta didik untuk menerima perbedaan dan mengembangkan kehidupan sosial yang damai. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia secara utuh pada akhirnya tidak hanya menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan, tetapi juga pribadi yang mampu menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Penanaman toleransi merupakan salah satu bagian penting dari pendidikan karakter dalam masyarakat majemuk. Toleransi dapat dipahami sebagai sikap menghargai keberadaan perbedaan, menerima ketidakseragaman, dan memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan latar belakang dan keyakinannya. Dalam konteks pendidikan nasional, nilai penghormatan terhadap keberagaman memiliki keterkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menghargai martabat manusia, keyakinan agama, suku, golongan, dan perbedaan lainnya. Pendidikan toleransi diperlukan karena peserta didik tidak hanya hidup dalam lingkungan sekolah, tetapi akan menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki beragam identitas dan kepentingan. Tsalisa (2024) menekankan pentingnya pendidikan toleransi dalam meningkatkan kesadaran peserta didik bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luas dan beragam, tetapi tetap terikat dalam identitas kebangsaan yang sama. Dari perspektif tersebut, pendidikan toleransi tidak sekadar mengajarkan peserta didik untuk “menerima” perbedaan, tetapi membentuk kesadaran bahwa kehidupan bersama membutuhkan penghormatan terhadap hak dan keberadaan orang lain.

Efektivitas pendidikan toleransi sangat ditentukan oleh pengalaman peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Nilai toleransi akan sulit berkembang apabila hanya disampaikan sebagai

materi pembelajaran tanpa diwujudkan dalam interaksi sehari-hari. Sekolah perlu menjadi lingkungan yang memberikan pengalaman nyata mengenai kesetaraan, penghargaan, kerja sama, dan penyelesaian konflik secara damai. Interaksi antarpeserta didik yang berbeda latar belakang dapat menjadi media pembelajaran sosial yang membantu mereka memahami perspektif orang lain dan mengembangkan empati. Dalam hal ini, guru memiliki posisi penting sebagai teladan sekaligus fasilitator. Guru perlu menunjukkan sikap adil dalam memberikan kesempatan belajar, menghindari perlakuan diskriminatif, serta membangun suasana kelas yang memungkinkan peserta didik menyampaikan pendapat tanpa takut direndahkan. Pembelajaran kelompok, diskusi mengenai keberagaman, kegiatan sosial, dan penyelesaian masalah secara musyawarah merupakan contoh praktik yang dapat menjadikan toleransi sebagai pengalaman nyata. Dengan demikian, pendidikan toleransi akan lebih efektif apabila terjadi keselarasan antara nilai yang diajarkan, perilaku pendidik, budaya sekolah, dan pengalaman sosial peserta didik.

Selain membentuk karakter individual, pendidikan toleransi memiliki dimensi kebangsaan yang berkaitan dengan penguatan persatuan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu ruang strategis untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan membangun kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari identitas Indonesia. Keanekaragaman dapat menjadi kekuatan apabila disertai kesadaran mengenai nilai-nilai bersama yang mengikat seluruh warga negara. Sebaliknya, apabila perbedaan dipahami secara eksklusif dan tidak disertai semangat kebangsaan, ikatan sosial dapat mengalami pelemahan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki relevansi dalam membangun kemampuan peserta didik untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus menghargai keberadaan kelompok lain. Muawanah (2018) menegaskan bahwa pendidikan PKN berperan dalam membina sikap toleransi antarsiswa agar mereka mampu saling bergaul, menghormati, dan membantu satu sama lain. Temuan tersebut menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya nilai moral individual, tetapi juga kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan untuk membangun kehidupan demokratis dan harmonis.

Penguatan toleransi melalui pendidikan juga menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi munculnya berbagai bentuk intoleransi yang dapat berkembang menjadi konflik sosial maupun radikalisme. Dalam situasi demikian, pendidikan perlu berperan sebagai ruang preventif yang membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, memahami perbedaan, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog. Pendidikan tidak seharusnya hanya memberikan informasi mengenai keberagaman, tetapi juga membantu peserta didik mengidentifikasi prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang dapat merusak hubungan sosial. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengintegrasikan nilai persatuan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap perbedaan ke

dalam pengalaman belajar. Pada saat yang sama, pendidikan agama dapat memberikan landasan moral dan spiritual untuk membangun kepedulian terhadap sesama. Dengan pendekatan yang terintegrasi, peserta didik dapat memahami bahwa mempertahankan identitas pribadi atau kelompok tidak harus dilakukan dengan menolak keberadaan orang lain. Sikap toleran justru menunjukkan kematangan dalam menjalankan identitas sekaligus menghargai kehidupan bersama.

Implikasi praktis dari pembahasan tersebut adalah perlunya perubahan orientasi pendidikan toleransi dari pendekatan yang bersifat teoritis menuju pendekatan yang berbasis pengalaman dan pembiasaan. Sekolah dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran kolaboratif yang mempertemukan peserta didik dari berbagai latar belakang, memberikan kesempatan yang setara dalam kegiatan akademik maupun nonakademik, serta membangun mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah. Guru perlu mendapatkan penguatan kompetensi dalam pendidikan multikultural, pengelolaan kelas yang inklusif, dan pencegahan diskriminasi. Materi pembelajaran juga perlu menghadirkan keberagaman secara proporsional agar peserta didik tidak hanya mengenal kelompoknya sendiri, tetapi mampu memahami perspektif kelompok lain. Keluarga dan masyarakat juga perlu dilibatkan karena pembentukan sikap toleransi tidak berlangsung hanya di sekolah. Konsistensi antara nilai yang diajarkan di sekolah dengan praktik kehidupan di keluarga dan masyarakat akan memperkuat internalisasi karakter toleran pada peserta didik.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, pendidikan memiliki kontribusi penting dalam menumbuhkan sikap toleransi karena berfungsi membentuk pengetahuan, karakter, dan pengalaman sosial peserta didik secara bersamaan. Toleransi yang efektif bukan sekadar kemampuan mengetahui bahwa perbedaan itu ada, melainkan kemampuan untuk menghargai, berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Tsalisa (2024) menegaskan pentingnya pendidikan toleransi untuk membangun kesadaran mengenai keberagaman bangsa, sedangkan Muawanah (2018) menunjukkan peran pendidikan PKN dalam membina hubungan yang saling menghormati dan membantu antarsiswa. Kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki dimensi personal sekaligus kebangsaan dalam pembentukan toleransi. Oleh karena itu, pendidikan perlu dikembangkan sebagai ekosistem yang mengintegrasikan pendidikan karakter, pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Jika dilaksanakan secara konsisten, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang toleransi, tetapi juga membentuk individu yang mampu mempraktikkan penghargaan terhadap perbedaan dan berkontribusi dalam memperkuat persatuan sosial di tengah masyarakat majemuk.

3. Tantangan Pendidikan dalam Mengelola Keberagaman

Pendidikan dalam masyarakat majemuk menghadapi tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sistem pendidikan menyediakan akses dan layanan yang bermutu, tetapi juga dengan kemampuan lembaga pendidikan mengelola keberagaman karakteristik peserta didik. Lisa dan Kurnia (2023) menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan berupa rendahnya kualitas pendidikan, ketidakmerataan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta tingginya angka putus sekolah. Persoalan struktural tersebut menjadi semakin kompleks karena Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, etnis, dan kondisi sosial yang membutuhkan pendekatan pendidikan yang adaptif. Ketika sistem pendidikan belum mampu memberikan kesempatan belajar yang setara sekaligus mengakomodasi keberagaman, pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan keberagaman tidak dapat dipisahkan dari upaya memperbaiki kualitas, pemerataan, dan inklusivitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

Tantangan berikutnya terdapat pada keberagaman peserta didik dalam lingkungan pembelajaran. Peserta didik tidak hadir dengan kondisi yang seragam, tetapi memiliki perbedaan dalam latar belakang budaya, kondisi sosial ekonomi, kemampuan akademik, gaya belajar, serta kebutuhan pendidikan. Khasanah (2023) menjelaskan bahwa keragaman tersebut menghadirkan tantangan bagi pendidik dalam mencapai tujuan kurikulum sekaligus memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Perbedaan kemampuan akademik, misalnya, menuntut guru menggunakan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan kapasitasnya, sedangkan variasi gaya belajar membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan metode dan media pembelajaran. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang seragam berpotensi mengabaikan kebutuhan sebagian peserta didik. Implikasi praktisnya, guru perlu mengembangkan pembelajaran yang lebih adaptif melalui diferensiasi materi, proses, dan bentuk evaluasi, serta membangun lingkungan kelas yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berpartisipasi secara optimal.

Selain persoalan pedagogis, keberagaman juga menghadirkan tantangan sosial-kultural yang berkaitan dengan persatuan bangsa. Indonesia memiliki keragaman bahasa, agama, suku, ras, adat, dan budaya yang dapat menjadi kekuatan sosial, tetapi juga memiliki potensi konflik apabila tidak disertai kesadaran kebangsaan dan kemampuan mengelola perbedaan. Maulidan dan Darmawan (2024) menyoroti ancaman disintegrasi bangsa yang dapat muncul dari pengelolaan keberagaman yang tidak tepat, termasuk konflik yang berkaitan dengan perbedaan budaya maupun kepentingan ekonomi dan politik. Yasila dan Najicha (2022) juga menempatkan pluralitas masyarakat Indonesia sebagai salah satu tantangan dalam mempertahankan persatuan apabila tidak disertai pemahaman dan sikap yang bijaksana terhadap perbedaan.

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki fungsi preventif dan transformatif karena dapat membentuk kesadaran peserta didik mengenai pentingnya kebinekaan, persatuan, dan penghormatan terhadap kelompok lain. Pendidikan perlu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami konflik secara kritis dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan kerja sama, bukan melalui diskriminasi maupun kekerasan.

Tantangan pengelolaan keberagaman juga semakin kompleks akibat kesenjangan digital. Perkembangan teknologi telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, tetapi manfaatnya belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik. Shafira et al. (2025) mencatat adanya perbedaan penetrasi internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi masih menjadi persoalan dalam pemerataan kesempatan belajar. Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan jaringan internet, tetapi juga dengan kemampuan guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan tanpa kebijakan pemerataan dapat menciptakan bentuk kesenjangan baru. Oleh karena itu, implikasi praktis yang perlu diperhatikan adalah penyediaan infrastruktur digital yang lebih merata, penguatan literasi digital bagi guru dan peserta didik, serta pengembangan alternatif pembelajaran yang tetap dapat digunakan pada wilayah dengan keterbatasan jaringan dan perangkat teknologi.

Dimensi ekonomi dan gender juga menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola keberagaman. Perbedaan kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan peserta didik karena biaya transportasi, perlengkapan belajar, dan kebutuhan pendidikan lainnya dapat menjadi beban bagi keluarga dengan sumber daya terbatas. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko ketidakhadiran atau putus sekolah dan pada akhirnya memperbesar kesenjangan pendidikan. Pada saat yang sama, ketidaksetaraan gender masih dapat menjadi hambatan bagi sebagian peserta didik untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, terutama ketika norma sosial, kondisi ekonomi, dan stereotip tertentu membatasi pilihan pendidikan. Kedua persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman membutuhkan pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Implikasi praktisnya adalah lembaga pendidikan perlu memperkuat mekanisme dukungan bagi peserta didik yang berada dalam kondisi rentan, menyediakan akses yang setara terhadap fasilitas pembelajaran, serta memastikan bahwa kebijakan sekolah tidak menghasilkan diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi maupun gender.

Tantangan lain berkaitan dengan kemampuan kurikulum dan lingkungan pendidikan dalam merespons keragaman konteks lokal. Kurikulum yang diterapkan secara seragam dapat menghadapi persoalan ketika harus diterapkan pada wilayah yang memiliki kondisi sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Karena itu, kurikulum perlu

memiliki ruang adaptasi agar materi dan pengalaman belajar dapat dikaitkan dengan realitas kehidupan peserta didik. Selain kurikulum, keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, pekerjaan, dan pemahaman orang tua mengenai proses belajar dapat menyebabkan perbedaan dukungan pendidikan di rumah. Jika sekolah dan keluarga tidak membangun komunikasi yang baik, kesenjangan dukungan tersebut dapat memengaruhi perkembangan peserta didik. Implikasi praktisnya adalah sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang kontekstual sekaligus membangun kemitraan dengan keluarga melalui komunikasi yang berkelanjutan, kegiatan pendampingan orang tua, dan program yang memungkinkan keluarga berpartisipasi dalam perkembangan pendidikan anak.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, tantangan pendidikan dalam mengelola keberagaman dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu struktural, pedagogis, dan sosial-kultural. Dimensi struktural mencakup ketidakmerataan akses, kualitas sumber daya pendidikan, kesenjangan digital, serta kondisi ekonomi; dimensi pedagogis berkaitan dengan kemampuan guru, keberagaman kemampuan dan gaya belajar peserta didik, serta fleksibilitas kurikulum; sedangkan dimensi sosial-kultural berkaitan dengan keberagaman identitas, intoleransi, ketidaksetaraan gender, dan potensi konflik antarkelompok. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman tidak dapat diselesaikan melalui satu kebijakan atau satu metode pembelajaran saja. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang kontekstual dan inklusif, penguatan literasi digital, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat menjalankan fungsinya bukan hanya sebagai penyedia pengetahuan, tetapi sebagai institusi sosial yang mampu mengelola perbedaan secara adil dan konstruktif. Apabila berbagai dimensi tersebut dikelola secara konsisten, keberagaman peserta didik tidak menjadi hambatan bagi pendidikan, tetapi dapat menjadi sumber pembelajaran sosial yang memperkuat toleransi, kohesi, dan persatuan dalam masyarakat majemuk.

4. Upaya Pendidikan dalam Memperkuat Persatuan Sosial

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam memperkuat persatuan sosial karena berfungsi membentuk pengetahuan, karakter, dan kompetensi sosial peserta didik dalam menghadapi keberagaman. Persatuan tidak terbentuk hanya melalui kesamaan identitas, tetapi melalui kemampuan individu untuk menerima perbedaan, membangun komunikasi, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Lisa dan Kurnia (2023) menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik yang nasionalis, religius, mandiri, kooperatif, dan demokratis. Nilai tersebut perlu diintegrasikan

dalam kurikulum dan diwujudkan melalui keterlibatan guru, orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk membangun kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehidupan bersama. Implikasi praktisnya adalah sekolah perlu menjadikan nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari budaya sekolah, bukan sekadar materi yang disampaikan secara teoritis.

Penguatan persatuan sosial juga membutuhkan sistem pembelajaran yang mampu mengakomodasi keragaman peserta didik. Khasanah (2023) menawarkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai pendekatan yang memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Diferensiasi dapat dilakukan melalui penyesuaian konten, proses, produk, dan lingkungan belajar sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan penguatan persatuan karena keadilan dalam pendidikan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ketika peserta didik merasa diterima dan memperoleh kesempatan belajar yang adil, potensi munculnya eksklusi dan marginalisasi dapat diminimalkan. Dalam praktiknya, guru dapat menyediakan variasi sumber belajar, metode pembelajaran, bentuk tugas, serta pola kerja kelompok yang memungkinkan peserta didik dengan kemampuan dan latar belakang berbeda untuk berkontribusi. Pembelajaran berdiferensiasi dengan demikian dapat menjadi salah satu strategi pedagogis untuk membangun lingkungan pendidikan yang inklusif.

Selain melalui proses pembelajaran, persatuan sosial perlu dibangun melalui kualitas hubungan interpersonal dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Hanafi dan Yasin (2023) mengidentifikasi komunikasi efektif, empati, penghargaan terhadap keberagaman, kolaborasi, dan partisipasi aktif sebagai unsur penting dalam memperkuat hubungan sosial. Kelima unsur tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan budaya sekolah yang toleran. Komunikasi terbuka memungkinkan peserta didik menyampaikan pendapat tanpa merasa terancam, sedangkan empati membantu mereka memahami perspektif orang lain. Penghargaan terhadap keberagaman mengurangi kecenderungan untuk menilai kelompok lain berdasarkan stereotip, sementara kolaborasi memberikan pengalaman konkret mengenai pentingnya bekerja bersama di tengah perbedaan. Oleh karena itu, sekolah perlu memperbanyak aktivitas yang mendorong kerja sama lintas kelompok, seperti proyek sosial, kegiatan gotong royong, diskusi, dan kegiatan kemasyarakatan. Implikasi praktisnya adalah pembentukan persatuan perlu dilakukan melalui pengalaman sosial yang berulang sehingga nilai toleransi dan solidaritas berkembang menjadi kebiasaan perilaku.

Strategi penguatan persatuan juga dapat dilakukan melalui pengintegrasian perspektif multikultural dalam materi pembelajaran. Maulidan dan Darmawan (2024) menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kerukunan antarsuku, agama, dan kelompok sosial dengan menghadirkan berbagai perspektif budaya dalam memahami peristiwa sejarah. Pembelajaran sejarah yang hanya menampilkan satu sudut pandang berpotensi menghasilkan pemahaman yang parsial mengenai pengalaman kelompok tertentu. Sebaliknya, pengenalan kontribusi berbagai kelompok dan analisis terhadap latar belakang kultural suatu peristiwa dapat membantu peserta didik memahami bahwa sejarah bangsa dibentuk oleh pengalaman berbagai komunitas. Pendekatan tersebut dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk melihat perbedaan perspektif secara kritis sekaligus menghargai kontribusi kelompok lain. Secara praktis, guru dapat menggunakan sumber sejarah yang beragam, menghadirkan narasi lokal, mengembangkan proyek sejarah komunitas, dan mengajak peserta didik mendiskusikan suatu peristiwa dari beberapa perspektif. Dengan demikian, pembelajaran sejarah dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran kebangsaan yang inklusif dan tidak menghapus keberagaman identitas.

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman peserta didik mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Yasila dan Najicha (2022) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mencakup berbagai aspek, antara lain bela negara, ideologi Pancasila, nilai dan moral, persatuan dan kesatuan, hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia. Pembelajaran tersebut perlu dikembangkan secara integratif melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar peserta didik tidak hanya mengetahui nilai kebangsaan, tetapi juga mampu menerima dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika perlu dipahami bukan sekadar semboyan, melainkan prinsip yang diwujudkan melalui perilaku menghargai perbedaan, bekerja sama, dan memperlakukan orang lain secara adil. Implikasi praktisnya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu menggunakan pendekatan yang partisipatif, seperti diskusi kasus, simulasi demokrasi, proyek kewarganegaraan, dan kegiatan sosial, sehingga peserta didik memiliki pengalaman nyata dalam menerapkan nilai persatuan.

Pada tingkat kelembagaan, penguatan persatuan sosial membutuhkan peningkatan kualitas pendidik sekaligus pemerataan sumber daya pendidikan. Yufarika (2023) menempatkan profesionalisme guru sebagai salah satu langkah fundamental dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru perlu memperoleh pengembangan profesional berkelanjutan yang mencakup pedagogi, teknologi pembelajaran, dan kemampuan memahami keragaman peserta didik. Pada saat yang sama, Shafira et al. (2025) menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan agar kesenjangan antarwilayah tidak semakin lebar. Pemerataan tersebut mencakup fasilitas sekolah, akses teknologi, jaringan internet, serta dukungan bagi peserta didik dari kelompok

ekonomi yang kurang mampu. Upaya ini perlu dilengkapi dengan kebijakan afirmatif, seperti dukungan pendidikan bagi wilayah tertinggal dan peserta didik rentan, sehingga persatuan sosial tidak hanya dibangun melalui nilai, tetapi juga melalui keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Dengan demikian, pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta perlu membangun kemitraan yang berkelanjutan dalam memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses secara lebih merata.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, upaya pendidikan dalam memperkuat persatuan sosial membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penguatan nilai Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan komunikasi dan empati, integrasi perspektif multikultural dalam pembelajaran sejarah, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, profesionalisme guru, serta pemerataan sumber daya pendidikan merupakan strategi yang saling melengkapi. Persatuan sosial tidak dapat dibangun hanya melalui satu mata pelajaran atau satu program, tetapi membutuhkan keselarasan antara kurikulum, praktik pembelajaran, budaya sekolah, kebijakan pendidikan, dan lingkungan sosial peserta didik. Implikasi praktis yang paling penting adalah perlunya membangun ekosistem pendidikan yang menjadikan keberagaman sebagai sumber pembelajaran dan persatuan sebagai orientasi bersama. Sekolah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap praktik inklusivitas, memperkuat kompetensi guru, melibatkan orang tua dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan dapat berfungsi sebagai kekuatan integratif yang tidak hanya meningkatkan kecerdasan peserta didik, tetapi juga membentuk generasi yang mampu menghargai perbedaan, membangun kerja sama, dan menjaga persatuan sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam mengelola keberagaman sekaligus memperkuat toleransi dan persatuan sosial dalam masyarakat majemuk. Keberagaman Indonesia yang meliputi perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, kondisi sosial, dan latar belakang peserta didik merupakan kekayaan yang dapat menjadi modal sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan diskriminasi, intoleransi, dan konflik apabila tidak dikelola secara tepat. Pendidikan multikultural, pendidikan karakter, pendidikan agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi ruang pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menghargai perbedaan melalui dialog, empati, kerja sama, keadilan, serta penghormatan terhadap hak setiap individu. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan, kesenjangan digital, keberagaman kebutuhan peserta didik, keterbatasan kompetensi pendidik, kesenjangan ekonomi dan gender, serta kurikulum yang belum sepenuhnya kontekstual dan inklusif. Karena

itu, diperlukan upaya yang terintegrasi melalui penguatan nilai Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan budaya sekolah yang inklusif, peningkatan profesionalisme guru, integrasi perspektif multikultural dalam pembelajaran, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, serta pemerataan sumber daya dan akses pendidikan. Secara mendesak, lembaga pendidikan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat perlu membangun ekosistem pendidikan yang menjadikan keberagaman sebagai sumber pembelajaran dan persatuan sebagai tujuan bersama, sehingga peserta didik tidak hanya memahami pentingnya toleransi secara konseptual, tetapi mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar terciptanya masyarakat yang inklusif, harmonis, adil, dan bersatu.

E. REFERENSI

- Acep, A., dan Abdurahman, A. (2026). Implementasi Pendidikan Multikultural untuk Penguatan Karakter Toleransi. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 118-127.
- Atmaja, I. M. D. (2020). Membangun Toleransi Melalui Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 113-121.
- Dahri, A., dan Wahyuni, S. (2025). Pendidikan Multikultural di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pengembangan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 222-231.
- Hadijaya, Y., Novita, W., YUSDIANA, E., & Islam, U. (2025). Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Kebudayaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 5, 276-87.
- Hanafi, A., dan Yasin, M. (2023). Upaya Memperkuat Hubungan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SINOVA: Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 1(2), 51-62.
- Khasanah, R. (2024). Memenuhi Target Kurikulum dan Tantangan dalam Mengelola Keragaman Siswa. *PRIMARY*, 2(5), 279-288.
- Lisa, M., dan Kurnia, H. (2023). Upaya Meningkatkan Pendidikan Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 472-478.
- Maulidan, A. C., dan Darmawan, W. (2024). Implikasi Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Persatuan Indonesia. *Jurnal Artefak*, 11(1), 49-64.
- Melkisedek, M., Marni, M., Topayung, S. L., & Beli, M. (2025). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Toleransi di Masyarakat Majemuk. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, 3(3), 31-46.
- Muawanah, M. (2018). Pentingnya Pendidikan untuk Tanamkan Sikap Toleran di Masyarakat. *Vijjacariya: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Buddhis*, 5(1).
- Purnama, S. (2021). Implementasi Pendidikan Multikultural Melalui Mata Pelajaran PPKN Untuk Mendukung Sikap Toleransi Siswa dalam Masyarakat Multikultur. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5753-5760.

- Ponno, A. T., Reniati, Y. S., Tangnga, S., & Mean, R. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Lingkup Masyarakat Majemuk. *Jurnal Salome: Multidispliner Keilmuan*, 1(5), 356-365.
- Saragih, D. R. P., Simatupang, J. D., & Siagian, H. (2023). Pendidikan Nilai-Nilai Kristen dalam Membangun Budaya yang Menghormati Keberagaman bagi Masyarakat Plural. *Discreet: Journal Didache of Christian Education*, 3(1), 1-16.
- Shafira, D., Aditya, F. A., Anggia, I. R., Putri, N. N. K., Al Hanif, S., & Prihantini, P. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Pendidikan Modern. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(1), 868-879.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tsalisa, H. H. (2024). Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Rasa Toleransi Beragama Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 39-49.
- Yasila, K. M. M., dan Najicha, F. U. (2022). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia. *Jurnal Global Citizen*, 11(1), 14-20.
- Yufarika, S. D. (2023). Tantangan Dunia Pendidikan dan Implikasinya terhadap Perubahan Kebijakan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 156-161.